

Katalog:

Indikator Kesejahteraan Rakyat

Kota Palu
2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PALU**

Indikator Kesejahteraan Rakyat

Kota Palu
2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PALU**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA PALU 2021

ISBN : 978-602-1385-75-3
No Publikasi : 72710.2219
Katalog : 4102004
Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman : x + 60 halaman

Naskah:

BPS Kota Palu

Penyunting:

BPS Kota Palu

Gambar Kulit:

BPS Kota Palu

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Kota Palu

Dicetak oleh:

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau mengandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pada hakikatnya bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat karena masyarakat merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian program pembangunan dalam bidang kesejahteraan rakyat, maka BPS Kota Palu sebagai penyedia data statistik, menerbitkan publikasi berjudul Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Palu 2021.

Publikasi ini merupakan salah satu produk tahunan BPS Kota Palu yang menyajikan data kondisi kesejahteraan rakyat di Kota Palu. Data untuk analisis indikator kesejahteraan rakyat ini sebagian besar bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

Dengan diterbitkannya buku ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mewujudkan publikasi ini, disampaikan terima kasih.

Palu, November 2022
Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Palu

G.A. Nasser

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	viii
BAB 1 KEPENDUDUKAN	1
1.1. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin	3
1.2. Penyebaran dan Kepadatan Penduduk	4
1.3. Angka Beban Ketergantungan	6
1.4. Komposisi Penduduk Menurut Status Perkawinan	7
1.5. Penggunaan Alat/Cara KB	10
BAB 2 PENDIDIKAN	13
2.1. Rata-rata Lama Sekolah	16
2.2. Partisipasi Sekolah	18
2.3. Kemampuan Baca Tulis dan Tingkat Pendidikan	20
BAB 3 KESEHATAN	23
3.1. Derajat dan Status Kesehatan	26
3.2. Kesehatan Ibu dan Balita	28
3.3. Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan	31
BAB 4 KETENAGAKERJAAN	35
4.1. Angkatan Kerja dan Pengangguran	37
4.2. Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan	40
4.3. Status Pekerjaan	41
BAB 5 PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN	43
5.1. Kepemilikan dan Kualitas Rumah Tinggal	45
5.2. Fasilitas Rumah Tinggal	51
BAB 6 INDIKATOR SOSIAL LAINNYA	55
6.1. Akses terhadap Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	57
6.2. Tindak Kejahatan	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Penduduk Kota Palu, 2021	4
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Palu, 2021	5
Tabel 1.3.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Umur dan Angka Beban Ketergantungan di Kota Palu, 2021	6
Tabel 1.4.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Umur dan Angka Beban Ketergantungan di Kota Palu, 2021	8
Tabel 1.5.	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Sedang Melaksanakan KB Menurut Jenis Alat Kontrasepsi di Kota Palu, 2021	12
Tabel 3.1.	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Palu, 2021	32
Tabel 3.2.	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kota Palu, 2021	32
Tabel 5.1.	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kota Palu, 2021 (persen)	51

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.	Persentase Penduduk 10 Tahun ke atas menurut Status Perkawinan Di Kota Palu Tahun, 2020 dan 2021	8
Grafik 1.2.	Persentase Umur Perkawinan Pertama Wanita Pernah Kawin Umur 10 Tahun Ke Atas di Kota Palu, 2021	9
Grafik 1.3.	Persentase Penduduk Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Partisipasi KB di Kota Palu, 2021	11
Grafik 2.1.	Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Palu, 2020 dan 2021 (Tahun)	17
Grafik 2.2.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Palu, 2020 dan 2021	18
Grafik 2.3.	Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Palu, 2020 dan 2021	20
Grafik 2.4.	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi Yang Dimiliki di Kota Palu, 2021	21
Grafik 3.1.	Umur Harapan Hidup Saat Lahir di Kota Palu, 2018-2021 (Tahun)	26
Grafik 3.2.	Persentase Penduduk yang Memiliki Keluhan Kesehatan Sebulan yang Lalu Menurut Jenis Kelamin di Kota Palu, 2019-2021 (Persen)	28
Grafik 3.3.	Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Penolong Kelahiran Terakhir di Kota Palu, 2021 (Persen)	30
Grafik 3.4.	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Tempat Melahirkan di Kota Palu, 2021 (persen)	31
Grafik 4.1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Palu, 2019 – 2021 (Persen)	39
Grafik 4.2.	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Palu, 2020 dan 2021 (persen)	40
Grafik 4.3.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kota Palu, 2021 (persen)	42

Grafik 5.1.	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Rumah di Kota Palu, 2021 (persen)	46
Grafik 5.2.	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Rumah Per Kapita di Kota Palu, 2021 (persen)	48
Grafik 5.3.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Rumah di Kota Palu, 2021 (persen)	49
Grafik 5.4.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Rumah di Kota Palu, 2021	50
Grafik 5.5.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas di Kota Palu, 2021	50
Grafik 6.1.	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Beberapa Akses Terhadap TIK di Kota Palu, 2021 (persen)	58
Grafik 6.2.	Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan di Kota Palu, 2021 (persen)	60

1

Kependudukan



BAB I

KEPENDUDUKAN

Dalam mekanisme perencanaan pembangunan, sumber daya manusia (SDM), dalam hal ini penduduk, memegang peranan penting dalam proses pembangunan suatu wilayah. Selain sebagai tujuan akhir, penduduk juga sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai

Dalam mekanisme perencanaan pembangunan, sumber daya manusia (SDM), dalam hal ini penduduk, memegang peranan penting dalam proses pembangunan suatu wilayah. Selain sebagai tujuan akhir, penduduk juga sebagai pelaksana dari suatu pembangunan. Oleh sebab itu, penataan dan pengembangan yang berkaitan erat dengan sumber daya manusia harus direncanakan dengan matang, karena jumlah penduduk yang besar merupakan modal atau aset pembangunan jika kualitasnya baik, sebaliknya hanya akan menjadi beban jika kualitas penduduknya rendah.

1.1. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kota Palu tahun 2021 berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) adalah sebesar 377.030 jiwa. Jika diurutkan berdasarkan kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah, jumlah penduduk Kota Palu merupakan urutan tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah.

Gambaran jumlah tersebut secara khusus dapat diamati dari komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin menurunkan salah satu indikator penting demografi yaitu rasio jenis kelamin (*sex ratio*). Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk wanita pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per 100 wanita. Data mengenai rasio

jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Misalnya, karena adat dan kebiasaan jaman dulu yang lebih mengutamakan pendidikan laki-laki dibanding perempuan, maka pengembangan pendidikan berwawasan gender harus memperhitungkan kedua jenis kelamin dengan mengetahui berapa banyaknya laki-laki dan perempuan dalam umur yang sama. Informasi tentang rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen (sirusa.bps.go.id).

Komposisi penduduk Kota Palu terdiri dari laki-laki 189.042 jiwa dan perempuan 187.988 jiwa. Dengan demikian, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan dengan perbandingan jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 100,56. Yang berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 101 jiwa penduduk laki-laki.

Tabel 1.1.
Penduduk Kota Palu, 2021

Jumlah Penduduk (jiwa)	373.218
(1)	(2)
• Laki-laki	189.042
• Perempuan	187.988
Rasio Jenis Kelamin	100.56

Sumber: Kota Palu Dalam Angka 2022

1.2. Penyebaran dan Kepadatan Penduduk

Secara administratif, Kota Palu terbagi ke dalam 8 kecamatan. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Mantikulore yang mencakup 20,67 persen penduduk Kota Palu. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Tawaeli yang mencakup 6,07 persen penduduk Kota Palu.

Kepadatan penduduk Kota Palu tahun 2021 mencapai 954 jiwa per km², dimana Kecamatan Palu Timur merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 5.634 jiwa per km², disusul oleh Kecamatan Palu Barat sebesar 5.621 jiwa per km². Sedangkan Kepadatan penduduk terkecil ada di Kecamatan Mantikulore dengan kepadatan sebesar 377 jiwa per km².

Kepadatan penduduk merupakan salah satu masalah kependudukan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh Pemerintah Kota Palu, sebab semakin besar jumlah penduduk yang berada di suatu wilayah maka akan semakin besar pula sarana pendukung yang diperlukan. Dengan luas wilayah yang relatif tidak terlalu besar, wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di Kota Palu menunjukkan adanya jumlah penduduk yang cukup besar yang tinggal dalam suatu wilayah yang relatif kecil.

Tabel 1.2.

Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Palu, 2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk Per Km ²
(1)	(2)	(3)	(4)
Palu Barat	46.544	683,92	5621
Tatanga	53.270	1.360,27	3563
Ulujadi	35.536	5.103,09	883
Palu Selatan	72.674	1.883,95	2654
Palu Timur	43.441	566,07	5634
Mantikulore	77.949	20.335,16	377
Palu Utara	24.716	3.051,61	826
Tawaeli	22.900	5.189,21	383
Kota Palu	377.030	38.173,28	954

Sumber: Kota Palu dalam Angka 2022

1.3. Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai kebutuhan hidup penduduk yang belum/tidak produktif lagi. Sebaliknya, persentase angka beban ketergantungan semakin kecil menunjukkan semakin rendahnya beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai kebutuhan hidup penduduk yang belum/tidak produktif. Pada tahun 2021, angka beban ketergantungan Kota Palu sebesar 38,08. Artinya, setiap 100 orang penduduk usia produktif memiliki tanggungan sebanyak 38-39 orang yang belum produktif atau dianggap tidak produktif lagi.

Tabel 1.3.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Umur dan Angka Beban Ketergantungan di Kota Palu, 2021

Umur	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
0 – 14 tahun	100.890	23,76
15 – 64 tahun	260.526	72,42
65+ tahun	15.614	3,82
Jumlah	377.030	100,00
Angka Beban Ketergantungan (persen)		38,08

Sumber Kota Palu dalam Angka 2022 dan Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah 2021

Angka beban ketergantungan di bawah 50 merupakan indikasi bahwa suatu daerah berada pada periode jendela peluang (*windows of opportunity*). Kesempatan ini sebagai dampak positif adanya bonus demografi (*demographic deviden*), yaitu bonus yang dinikmati suatu wilayah sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialaminya.

Sebuah negara dikatakan mengalami bonus demografi jika dua orang penduduk usia produktif (15-64) menanggung satu orang tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 65 tahun atau lebih). Keuntungan bonus demografi dari sisi perekonomian tentu akan membuka peluang peningkatan perekonomian melalui peningkatan pendapatan. Ilustrasinya, dalam suatu rumah tangga terdapat 2 anggota rumah tangga usia produktif (misalnya ayah dan ibu) dan satu anggota rumah tangga yang tidak produktif, anak di bawah 15 tahun misalnya. Jika terdapat kesempatan kerja yang juga cukup untuk menampung mereka, maka akan terjadi kelebihan kemampuan memenuhi kebutuhannya sehingga ada kemampuan bagi rumah tangga untuk melakukan saving (menabung) atau melakukan investasi sumber daya manusia (human capital) yang lebih tinggi baik bagi kedua orang tua pada ilustrasi tadi ataupun bagi anaknya. Investasi human capital misalnya dengan menyekolahkan pada jenjang yang lebih tinggi, ataupun meningkatkan kemampuan tambahan misalnya melalui kursus dan lain-lain.

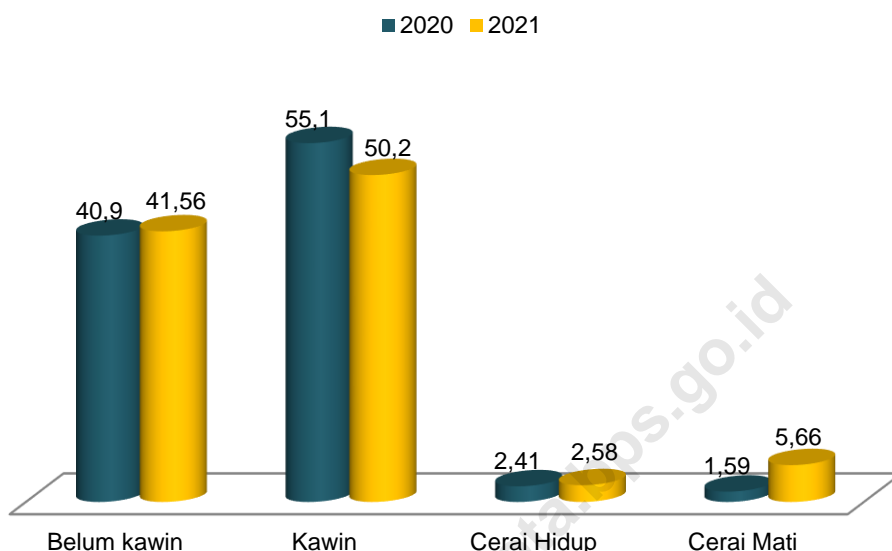
Jendela peluang (*windows of opportunity*) ini tidak boleh disia-siakan, harus disertai dengan peningkatan kesempatan lapangan kerja. Salah satunya dengan menggenjot lapangan usaha yang belum maksimal dan memacu perkembangan UMKM untuk menyerap angkatan kerja yang berlimpah.

1.4. Komposisi Penduduk menurut Status Perkawinan

Penduduk menurut status perkawinan dibedakan atas belum kawin, kawin, dan cerai. Cerai meliputi mereka yang cerai hidup maupun cerai mati. Grafik 1.1. di bawah menunjukkan persentase penduduk menurut status perkawinan penduduk Kota Palu usia 10 tahun ke atas tahun 2020 dan 2021 berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2020 dan 2021. Grafik tersebut menunjukkan adanya sedikit penurunan penduduk umur 10 tahun ke atas dengan status perkawinan belum kawin, cerai hidup, dan cerai mati. Sedangkan pada status perkawinan kawin mengalami sedikit peningkatan.

Grafik 1.1.

Persentase Penduduk 10 Tahun ke atas menurut Status Perkawinan Di Kota Palu Tahun, 2020 dan 2021



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 dan 2021

Selain komposisi penduduk menurut status perkawinan, status perkawinan penduduk wanita pada kelompok umur 15 – 49 tahun juga penting untuk dicermati, karena hal ini berkaitan dengan potensi melahirkan yang dapat memengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk. Berdasarkan tabel 1.4. di bawah, dapat dilihat pola yang sama dengan grafik 1.1, yaitu adanya penurunan angka belum kawin pada jumlah wanita umur 15 – 49 tahun, dan ada peningkatan bagi mereka yang berstatus kawin dan cerai.

Tabel 1.4.

Persentase Penduduk Wanita Berumur 15-49 Tahun menurut Status Perkawinan di Kota Palu, 2020 - 2021

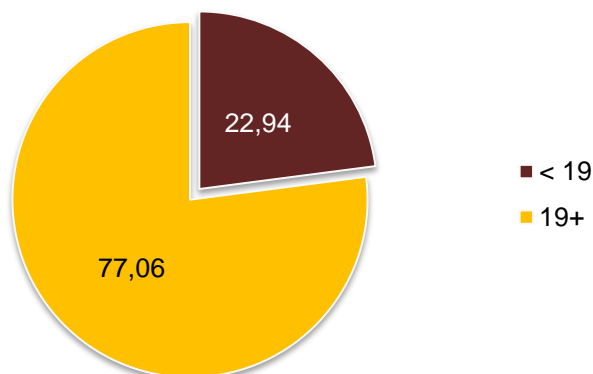
Status Perkawinan	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Belum kawin	94,06	40,12
Kawin	5,94	54,16
Cerai hidup	-	3,21
Cerai mati	-	2,52

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 dan 2021

Indikator lain yang berkaitan dengan masalah kependudukan adalah penduduk wanita menurut usia perkawinan pertama. Semakin muda usia kawin pertama yang dilakukan seseorang, maka akan semakin lama pula masa reproduksinya. Hal ini berpengaruh pada tingkat fertilitas wanita dan penduduk secara umumnya. Semakin lama masa reproduksi wanita, maka kemungkinan wanita tersebut melahirkan banyak anak akan semakin besar. Dalam persoalan makro, hal ini akan menyebabkan meningkatnya tingkat pertumbuhan penduduk suatu daerah.

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1, syarat menikah untuk laki-laki minimal sudah berusia 19 tahun dan untuk perempuan harus sudah berusia 16 tahun. Pasal 6 ayat 2 berbunyi, jika menikah di bawah usia 21 tahun harus disertai dengan izin kedua atau salah satu orang tua atau yang ditunjuk sebagai wali. Sedangkan menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama idealnya adalah umur 21 hingga 25 tahun. Rekomendasi BKKBN sesuai dengan hak pendidikan 12 tahun, juga diharapkan ketika sudah memiliki kesiapan psikologis, kesehatan reproduksi serta kemampuan material dan mencegah meningkatnya pernikahan anak.

Grafik 1.2.
Persentase Umur Perkawinan Pertama Wanita Pernah Kawin Umur 10 Tahun Ke Atas di Kota Palu, 2021



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2021, sebagian besar perempuan di kota Palu pada tahun 2021 melakukan perkawinan pertama pada usia di atas 19 tahun. Sementara sisanya, 22,94 persen perempuan pernah kawin dengan usia perkawinan pertama di bawah 19 tahun. Perkawinan di bawah usia 19 tahun secara kesehatan reproduksi bisa dikatakan masih muda. Begitupun secara mental, sosial, dan ekonomi pada umumnya belum mapan.

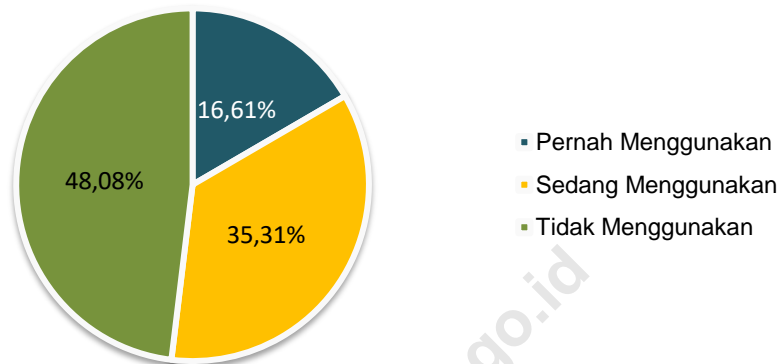
Fenomena perkawinan di bawah umur perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah Kota Palu, karena pernikahan yang terjadi di usia dini, selain berpotensi meningkatkan jumlah kelahiran juga beresiko terhadap kesehatan dan psikologis wanita.

1.5. Penggunaan Alat/Cara KB

Selain pendewasaan usia kawin pertama, cara lain yang efektif dalam mengendalikan angka kelahiran yaitu melalui program Keluarga Berencana (KB). Program KB merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak, dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan penggunaan berbagai macam alat kontrasepsi. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat, terutama untuk partisipasi KB dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), seperti IUD dan Implan. Dengan cakupan KB yang semakin meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan lebih baik sekaligus dapat meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.

Grafik 1.3.

Persentase Penduduk Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Partisipasi KB di Kota Palu, 2021



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Pada tahun 2021, penduduk wanita berumur 15-49 tahun yang pernah kawin di Kota Palu, 35,31 persen di antaranya sedang menggunakan KB dan masih terdapat 48,08 persen yang tidak menggunakan alat kontrasepsi. Kondisi wanita yang berstatus pernah kawin dan tidak menggunakan KB bisa disebabkan karena berstatus kawin cerai, dalam kondisi hamil, sedang program hamil, atau mengalami keluhan dalam penggunaan alat KB.

Menurut masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu alat kontrasepsi hormonal dan permanen. Alat kontrasepsi hormonal biasanya digunakan untuk menunda dan mengatur jarak kehamilan. Sedangkan kontrasepsi permanen biasanya digunakan karena tidak lagi menginginkan kehamilan, baik disebabkan oleh faktor kesehatan, usia, maupun jumlah anak yang telah dilahirkan. Di Kota Palu, alat KB yang paling banyak digunakan yaitu suntikan dan pil. Terdapat 38,62 persen penduduk perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin dan sedang ber KB menggunakan suntikan dan 35,41 persen yang menggunakan pil.

Tabel 1.5.

Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Sedang Melaksanakan KB Menurut Jenis Alat Kontrasepsi di Kota Palu, 2021

Jenis Alat KB	Persentase
(1)	(2)
Sterilisasi wanita/Tubektomi/MOW	3,09
Sterilisasi pria/Vasektomi/MOP	0,00
IUD/AKDR/Spiral	10,58
Suntikan	38,62
Susuk KB/Implan	3,98
Pil	35,41
Kondom pria/Karet KB	0,00
Intravag/Kondom wanita/Diafragma	0,00
Metode menyusui alami	0,70
Pantang berkala/Kalender	7,63
Total	100,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

2

Pendidikan

<http://paku.go.id>
<http://bps.go.id>



BAB II

PENDIDIKAN

Pendidikan memegang peranan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan membantu sumber daya manusia untuk menjadi lebih mudah mengerti dan siap akan perubahan. Dalam makna luas, pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran yang bisa dilakukan dimana saja. Karenanya, pendidikan menjadi salah satu kebutuhan dasar setiap warga negara. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pengajaran. Pada pasal yang lain, yaitu pasal 28C ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pemerintah Indonesia saat ini sangat gencar melaksanakan berbagai macam program pembangunan pendidikan, salah satunya melalui alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN. Diharapkan dengan besarnya anggaran tersebut dapat menghasilkan anak-anak yang mampu mendapatkan proses belajar yang efektif dan unggul, sehingga bisa menyiapkan diri menghadapi masa depan yang penuh kesempatan dan tantangan. Dengan kualitas sumber daya manusia yang baik, diharapkan pembangunan nasional dapat lebih terjamin dan mampu memajukan bangsa di dunia internasional.

Upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu misi pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Masalah

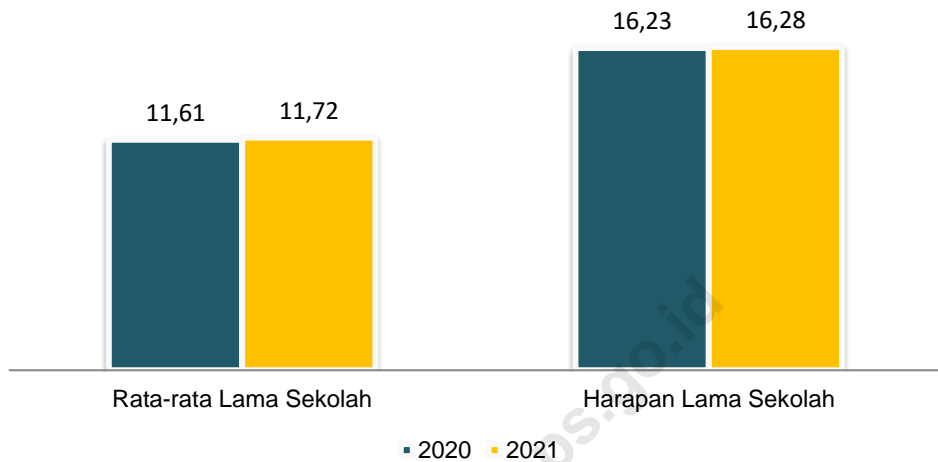
pemerataan pendidikan sejalan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Mengacu pada pembahasan di atas, beberapa indikator terkait dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini, diantaranya Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan angka Partisipasi Murni (APM). Beberapa indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh BPS.

2.1. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal.. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Indikator ini dihitung dari penduduk yang berusia 25 tahun ke atas karena mengikuti standar internasional yang digunakan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP), sehingga dapat dibandingkan dengan negara-negara lain. Selain itu dipilih penduduk umur 25 tahun ke atas karena asumsinya pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Indikator ini juga digunakan sebagai pengukur dimensi pendidikan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Grafik 2.1.
Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Palu, 2020 dan 2021 (Tahun)



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020 dan 2021

Demikian pula dengan angka harapan lama sekolah. Angka harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka ini dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun.

Secara umum, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kota Palu mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Dilihat dari besarnya, tercatat angka harapan lama sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah. Hal ini menjadi wajar, mengingat bahwa dari tahun ke tahun kualitas pendidikan terus ditambah dan diperbaharui, terutama pada kelompok pendidikan dasar. Upaya ini juga meningkatkan partisipasi sekolah penduduk berusia 7 tahun ke atas. Semakin tinggi partisipasi sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas, maka harapan lama sekolah akan semakin panjang. Di sisi lain, rata-rata lama sekolah menunjukkan masa pendidikan yang sudah ditempuh oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas. Seperti yang diketahui bahwa keterjangkauan pendidikan pada masa silam tidak semudah saat ini. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi sekolah pada tahun-tahun tersebut, sehingga rata-rata lama sekolah yang telah ditempuh penduduk usia 25 tahun masih relatif rendah.

2.2. Partisipasi Sekolah

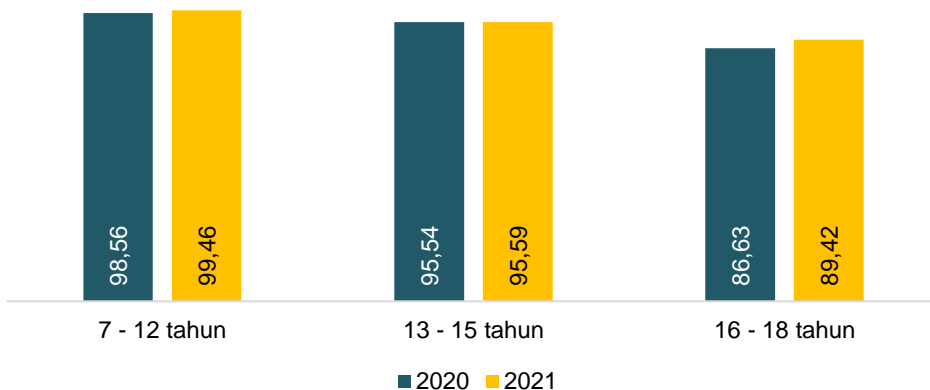
Indikator capaian pendidikan yang lain selain rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah adalah tingkat partisipasi sekolah. Tingkat partisipasi sekolah mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Beberapa ukuran tingkat partisipasi sekolah yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

APS merupakan indikator yang menggambarkan berapa banyak penduduk yang mempunyai kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan biasanya disebabkan oleh sedikitnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan.

APK merupakan indikator untuk mengukur proporsi anak sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sedangkan APM adalah indikator yang menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

Grafik 2.2.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Palu, 2020 dan 2021 (persen)



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Palu Tahun 2021

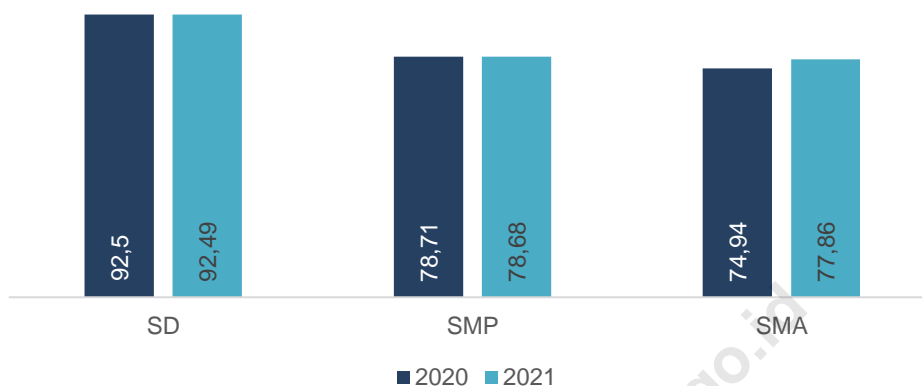
Secara umum, APS Kota Palu tahun 2021 tergolong cukup baik, khususnya pada kelompok usia 7-12 tahun dengan angka 99,46 persen.

Artinya sebanyak 99,46 persen anak-anak usia 7-12 tahun sedang memperoleh pendidikan baik formal maupun nonformal. Begitupun pada jenjang usia 13-15 tahun dengan angka APS sebesar 95,59 persen. Ini berarti sebanyak 95,59 persen anak-anak usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah formal maupun nonformal. Sementara itu, nilai APS jenjang usia 16 – 18 tahun hanya sebesar 89,42 persen. Angka ini telah mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 84,9 persen.

Angka APS untuk jenjang pendidikan menengah atas lebih rendah dibandingkan dengan APS jenjang usia di bawahnya. Hal ini disebabkan banyaknya anak yang tidak melanjutkan sekolah dan memilih terjun ke dunia kerja. Oleh karena itu, peningkatan APS pada jenjang usia ini masih perlu ditingkatkan. Jika diperhatikan, semakin meningkat jenjang usia, nilai APS semakin menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin banyak anak yang berhenti sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

APS dapat digunakan untuk mengukur pemerataan akses pendidikan. Akan tetapi, informasi yang digambarkan oleh APS ini tidak memperhitungkan anak pada kelompok yang bersekolah pada jenjangnya. Contohnya, APS pada jenjang usia 13-15 mengabaikan anak usia 15 tahun yang sudah bersekolah SMA/ sederajat. Untuk menggambarkan partisipasi sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikannya, maka dapat menggunakan indikator APM.

Grafik 2.3.
Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Palu, 2020 dan 2021



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Palu Tahun 2021

Pola APM di Kota Palu hampir sama dengan dengan pola APS di mana angka tertinggi berada pada jenjang SD/Sederajat, yang pada tahun 2021 sebesar 92,49 persen. Hal ini berarti sebesar 92,49 persen anak usia sekolah setara SD bersekolah tepat waktu sesuai usianya. Kemudian semakin tinggi jenjang pendidikan, nilai APM semakin rendah, yaitu 78,68 persen pada jenjang SMP/Sederajat dan 77,86 persen pada jenjang SMA/Sederajat. Rendahnya APM jenjang SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat menunjukkan bahwa masih banyaknya anak usia 13-15 tahun yang belum merasakan pendidikan SMP/Sederajat dan anak usia 16-18 tahun yang belum merasakan pendidikan jenjang SMA/Sederajat.

Persentase jenjang SMA/Sederajat selalu lebih kecil dari APM pada jenjang pendidikan di bawahnya, bisa jadi karena disebabkan oleh biaya pendidikan yang lebih tinggi serta kemauan yang lebih besar.

2.3. Kemampuan Baca Tulis dan Tingkat Pendidikan

Membaca dan menulis merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Dengan kemampuan membaca dan menulis, seseorang dapat menjangkau ilmu pengetahuan, menggali potensi, dan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa karena sebagian besar aspek kehidupan

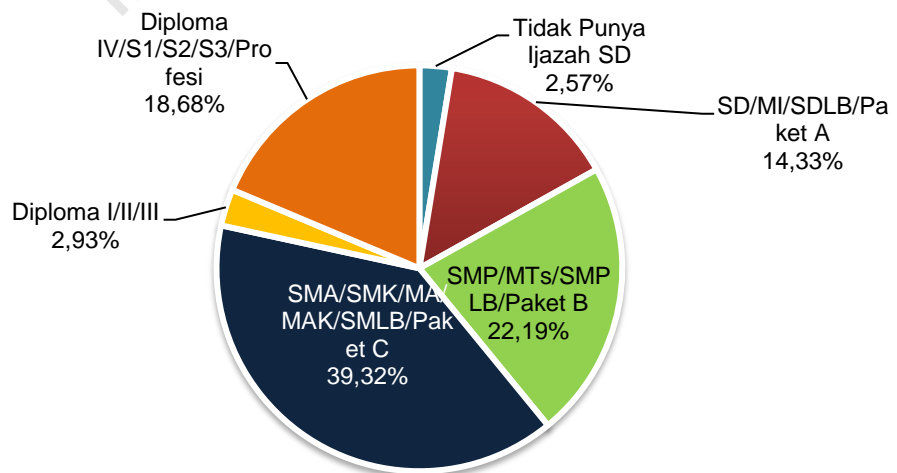
manusia membutuhkan kemampuan membaca dan menulis. Oleh karena itu, kemampuan baca-tulis penduduk dewasa dapat dijadikan sebagai ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan.

Pada tingkat makro, salah satu indikator dasar untuk melihat tingkat kemampuan membaca dan menulis adalah melalui Angka Melek Huruf (AMH). Ukuran angka melek huruf ini diukur pada penduduk usia 15 tahun ke atas karena pada usia tersebut dianggap sebagai masyarakat dewasa yang sudah seharusnya dapat membaca dan menulis.

Pada tahun 2021, AMH bagi penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Palu telah mencapai 100 persen, angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 99,78 persen. Hal ini berarti pada tahun 2021, sudah sekitar 100 persen penduduk Kota Palu yang berumur 15 tahun ke atas dapat membaca dan menulis huruf latin. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat kemampuan membaca dan menulis penduduk Kota Palu sudah sangat baik.

Grafik 2.4.

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi Yang Dimiliki di Kota Palu, 2021



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Kualitas sumber daya manusia lebih spesifik dapat dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Lebih rinci, komposisi penduduk berusia 15 tahun ke atas menurut ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki di Kota Palu dapat dilihat pada Grafik 2.4 di atas. Sejumlah 2,57 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas tidak atau belum pernah sekolah dan tidak atau belum tamat SD. Proporsi terbesar dari penduduk usia 15 tahun ke atas tahun 2021 menurut ketuntasan pendidikan adalah penduduk tamatan SMA/SMK/MA/MAK/SMLB/Paket C, yaitu sebesar 39,32 persen.

<https://palukota.bps.go.id>

3

Kesehatan

<http://pala.kemra.bps.go.id>



BAB III

KESEHATAN

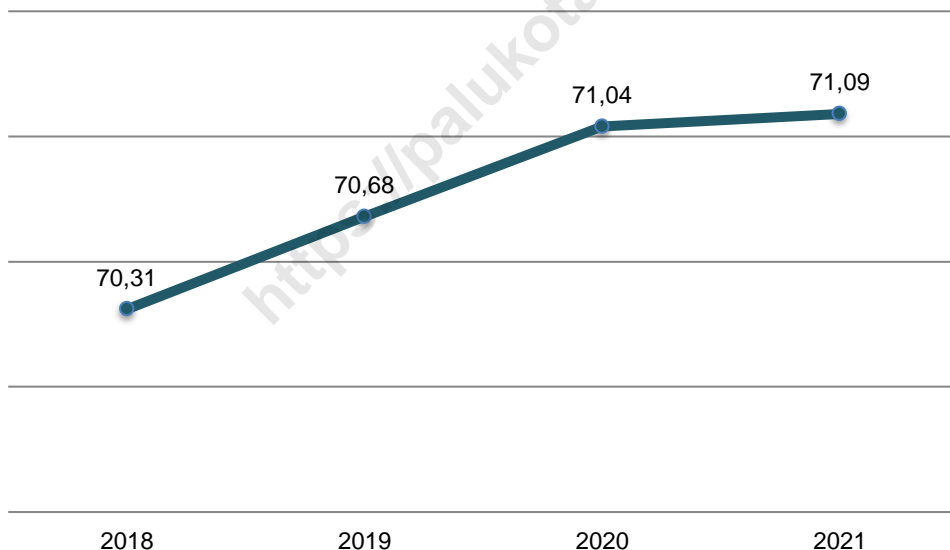
Kondisi kesehatan penduduk merupakan salah satu indikator penting dari kesejahteraan masyarakat. Selain pendidikan, pemerintah juga gencar meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat. Menurut Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif dan ekonomis. Kesehatan sangat erat kaitannya dengan aktivitas manusia. Suatu kegiatan akan lebih berkualitas apabila dilaksanakan dalam kondisi tubuh yang sehat.

Indikator keberhasilan atas upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan pembangunan dalam bidang kesehatan, dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan, antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, seperti persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk. Indikator-indikator kesehatan yang akan dibahas adalah yang bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Namun karena keterbatasan data Susenas, tidak memungkinkan untuk memberikan semua indikator kesehatan yang telah disebutkan di atas.

3.1. Derajat dan Status Kesehatan

Salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur derajat kesehatan suatu masyarakat adalah Umur Harapan Hidup (UHH). UHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH yang menggambarkan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah merupakan indikator dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Semakin tinggi UHH menunjukkan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat suatu wilayah.

Grafik 3.1.
Umur Harapan Hidup Saat Lahir di Kota Palu, 2018-2021 (Tahun)



Sumber: <https://bps.go.id/indicator/26/414/1/-metode-baru-umur-harapan-hidup-saat-lahir-uhh-.html>

Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, UHH kota Palu terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, UHH Kota Palu mencapai 71,09 persen, naik 0,05 tahun dari tahun sebelumnya. Angka ini memberi makna bahwa secara rata-rata, bayi yang baru lahir pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan usia 71,09 tahun. Peningkatan angka UHH dapat dipengaruhi oleh beragam faktor, diantaranya semakin baik dan

mudahnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh kelompok masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat oleh masyarakat luas dan semakin baiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat.

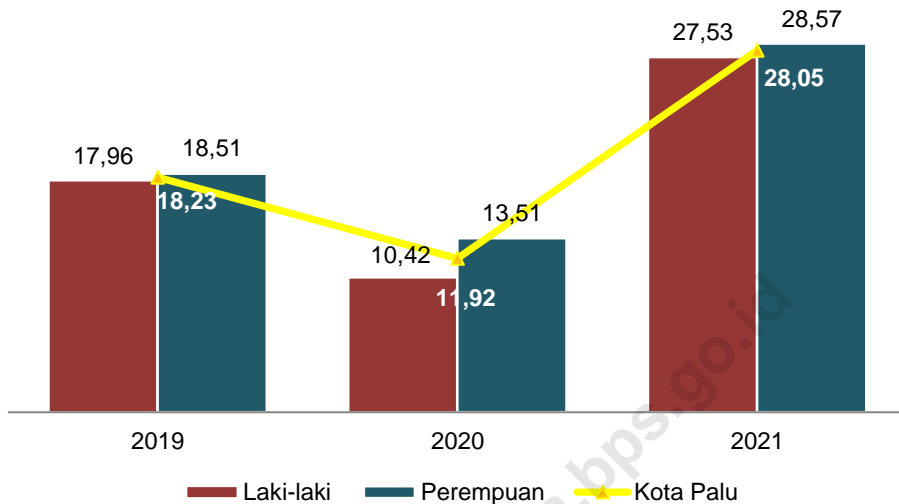
Selain itu, status kesehatan penduduk juga dapat digambarkan dari tingkat morbiditas (angka kesakitan). Angka kesakitan merupakan persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan. Angka kesakitan menunjukkan adanya gangguan atau keluhan kesehatan yang berakibat pada terganggunya aktivitas sehari-hari, baik karena gangguan/penyakit yang umum dialami penduduk seperti panas, diare, pusing, pilek, sakit kepala berulang, maupun karena penyakit akut dan penyakit kronis, kecelakaan, kriminalitas, maupun keluhan yang lain.

Angka kesakitan diukur dari rasio persentase antara jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya kegiatan dibandingkan dengan jumlah penduduk. Sehingga, semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi pada wilayah tersebut.

Pada tahun 2021, angka kesakitan penduduk Kota Palu adalah 13,30 persen. Ini berarti terdapat 13,30 persen penduduk Kota Palu yang menderita sakit sehingga mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Seperti yang terlihat pada Grafik 3.2, persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan Kota Palu tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun 2020, yaitu 28,05 persen di tahun 2021 dan 11,92 persen di tahun 2020.

Grafik 3.2.

Persentase Penduduk yang Memiliki Keluhan Kesehatan Sebulan yang Lalu Menurut Jenis Kelamin di Kota Palu, 2019-2021 (Persen)



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2021

Fakta lain menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan terhadap penyakit dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan dalam satu bulan terakhir pada tahun 2021 sebesar 28,57 persen, lebih besar dibandingkan dengan laki-laki yang sebesar 27,53 persen. Secara tidak langsung, kondisi ini memberikan *warning* kepada perempuan untuk lebih menjaga kesehatan.

3.2. Kesehatan Ibu dan Balita

Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu target SDGs di sektor kesehatan. Diharapkan pada tahun 2030, dapat dikurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Selain itu, diharapkan juga pada tahun 2030, dapat diakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.

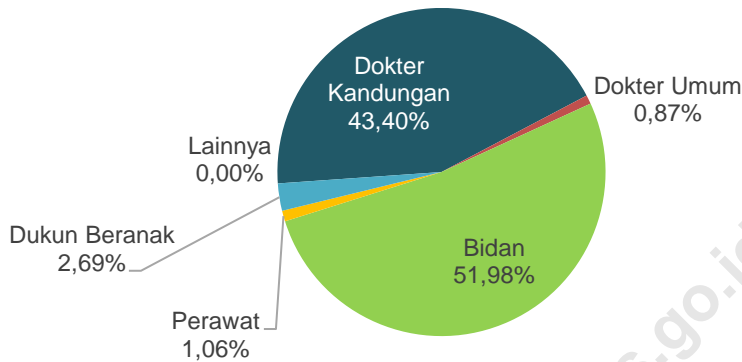
Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. AKI digunakan sebagai digunakan sebagai indikator untuk memonitor kematian terkait dengan kehamilan, persalinan, dan nifas. AKI dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan pelayanan kesehatan selama kehamilan dan melahirkan.

Upaya untuk menurunkan AKI dapat dilakukan dengan menjamin kemudahan setiap ibu dalam mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan pemahaman terhadap kesehatan ibu hamil serta janin yang dikandungnya. Diantara upaya yang dapat dilakukan berupa pelayanan dalam persalinan agar dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional (dokter, bidan dan tenaga kesehatan lainnya). Persalinan yang ditolong oleh tenaga terdidik dan terlatih akan meningkatkan kesehatan dan kelangsungan hidup ibu dan bayi.

Keberhasilan program ini dapat diukur berdasarkan indikator persentase tenaga penolong dan fasilitas tempat persalinan yang digunakan. Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan mampu memperluas akses, meningkatkan sarana prasarana pelayanan, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pelayanan kesehatan.

Grafik 3.3.

Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Penolong Kelahiran Terakhir di Kota Palu, 2021 (Persen)



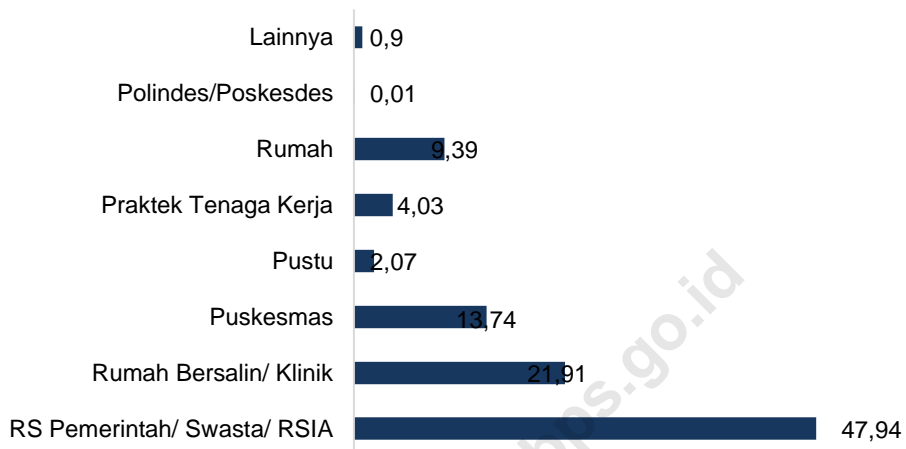
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Dalam aspek tenaga persalinan, penduduk di Kota Palu umumnya sudah memiliki pilihan untuk menggunakan tenaga kesehatan/medis, terutama bidan (51,98 persen). Selain bidan, penduduk di Kota Palu memilih dokter kandungan dalam hal penolong persalinan juga cukup banyak yakni sekitar 43,40 persen. Namun, penanganan kelahiran di Kota Palu tahun 2021 belum sepenuhnya dilakukan oleh tenaga kesehatan, masih ada 2,69 persen yang memanfaatkan dukun beranak. Adapun masyarakat banyak menggunakan jasa dokter kandungan karena akses pelayanan dokter kandungan di perkotaan relatif lebih mudah. Masyarakat perkotaan juga lebih memilih dokter kandungan karena mempertimbangkan pengetahuan kesehatan dokter kandungan yang lebih terpercaya.

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan tidak hanya dilihat dari indikator penolong persalinan tetapi juga dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat persalinan. Persentase penduduk berumur 15-49 tahun pernah kawin yang pernah melahirkan dalam dua tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 3.4. berikut.

Grafik 3.4.

Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Tempat Melahirkan di Kota Palu, 2021 (persen)



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa sebanyak 47,94 persen masyarakat memilih melahirkan di RS pemerintah/ swasta/ RSIA, 21,91 persen memilih melahirkan di rumah bersalin/ klinik, 13,74 persen melahirkan di Puskesmas, dan sebanyak 4,033 persen memilih melahirkan di praktek tenaga kerja.

3.3. Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor penentu utama. Ketersediaan sarana dan fasilitas kesehatan juga harus diupayakan dengan mutu dan kualitas yang baik. Tidak hanya dari sisi ketersediaan, kemudahan akses dan keterjangkauannya juga harus diupayakan agar adil dan merata.

Pada tahun 2021, terdapat 11 unit rumah sakit umum di Kota Palu. Selain itu, terdapat 14 unit puskesmas dan 223 unit posyandu yang menjadi pendukung untuk menjangkau masyarakat di level kecamatan dan kelurahan. Dengan jumlah kecamatan yang sebanyak 8 menunjukkan bahwa setidaknya

dalam satu kecamatan sudah terdapat minimal satu puskesmas. Selain itu, jumlah posyandu sebanyak 223 unit dan dengan jumlah kelurahan sebanyak 46, berarti setidaknya rata-rata terdapat minimal satu posyandu di masing-masing kelurahan.

Tabel 3.1.
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Palu, 2021

Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah
(1)	(2)
Rumah Sakit Umum	11
Rumah Sakit Bersalin	3
Puskesmas	14
Puskesmas Pembantu	25
Apotek	37
Poliklinik	16

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2022

Selain ketersediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan posyandu, juga diperlukan tenaga medis yang memadai. Pada tahun 2021, jumlah tenaga kebidanan di Kota Palu sebanyak 670 orang, tenaga keperawatan 1.817 orang, tenaga kefarmasian 301 orang, dokter 473 orang, dan ahli gizi 102 orang.

Tabel 3.2.
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kota Palu, 2021

Tenaga Kesehatan	Jumlah
(1)	(2)
Tenaga Kebidanan	670
Tenaga Keperawatan	1.817
Tenaga Kefarmasian	301
Dokter	473
Ahli Gizi	102

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2022

Apabila dihitung rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk, maka jumlah tenaga kesehatan tersebut sudah cukup memadai. Salah satu contohnya, dengan jumlah dokter yang sebanyak 473 orang dengan jumlah penduduk Sulawesi Tengah sebanyak 377 ribu jiwa, berarti 1 (satu) dokter

menangani sekitar tujuh ratus lebih penduduk dalam setahun. Beban ini sudah cukup, apalagi jika dibanding dengan tahun sebelumnya.

<https://palukota.bps.go.id>

4

Ketenagakerjaan



BAB IV

KETENAGAKERJAAN

Masalah ketenagakerjaan merupakan hal mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Saat ini, ketenagakerjaan masih menjadi masalah yang belum kunjung selesai. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya pembukaan kesempatan kerja baru, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil kendala yang dihadapi oleh pemerintah terkait ketenagakerjaan. Masalah ini jika tidak segera tertangani dengan baik, dapat menimbulkan masalah sosial yang lain.

Data dan informasi terkait ketenagakerjaan sangat dibutuhkan dalam penyelesaian masalah ini, baik untuk penyusunan kebijakan, strategi, dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan wilayah dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Tidak hanya itu, pemanfaatan data ketenagakerjaan ini juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Beberapa indikator yang menggambarkan ketenagakerjaan antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, dan persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha.

4.1. Angkatan Kerja dan Pengangguran

Sumber daya manusia yang produktif merupakan penduduk usia kerja yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan barang atau jasa. Adapun batas bawah usia kerja yaitu 15 tahun. Dalam konsep ketenagakerjaan, penduduk usia kerja terbagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan

angkatan kerja. Konsep angkatan kerja merujuk pada kegiatan utama yang dilakukan oleh penduduk usia kerja selama periode tertentu. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sementara itu, bukan angkatan kerja didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja mencakup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya (pensiun, penerima transfer/kiriman, penerima deposito/bunga bank, jompo atau alasan lainnya). Jumlah angkatan kerja merupakan salah satu variabel yang digunakan dalam menghitung Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

TPAK digunakan dalam mengetahui besarnya persentase penduduk usia kerja yang berpotensi untuk aktif secara ekonomi di suatu negara. Semakin tinggi angka TPAK menandakan bahwa ketersediaan penduduk usia kerja yang dapat terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi semakin banyak.

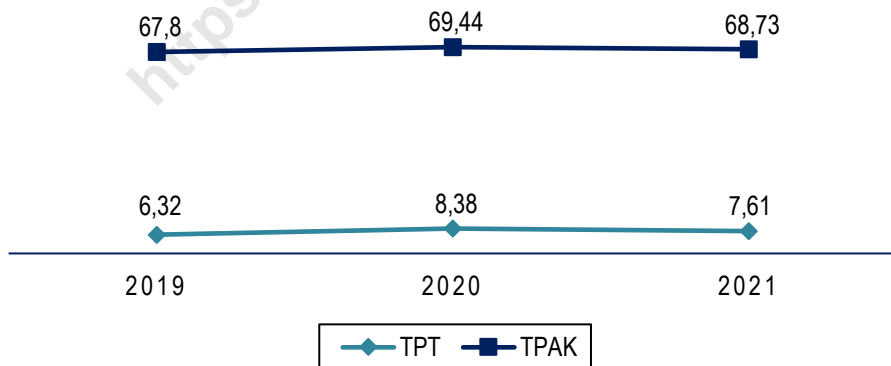
Dari seluruh angkatan kerja yang tersedia, tidak semua terserap di lapangan pekerjaan. Selain analisis angkatan kerja, dalam bidang ketenagakerjaan juga dikenal indikator pengangguran yang diukur melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan salah satu indikator penting dalam kegiatan perekonomian, karena indikator ini bisa menjadi ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesediaan tenaga kerja sehingga mempunyai arti penting bagi keperluan perencanaan pembangunan khususnya di bidang ketenagakerjaan baik secara regional maupun nasional.

Pada bulan Agustus 2021, tercatat sebanyak 309.046 jiwa penduduk usia kerja (lebih dari 15 tahun) di Kota Palu. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2020 yaitu sebesar 304.633 jiwa. Sedangkan penduduk usia kerja yang bekerja, atau memiliki pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan pengangguran pada bulan Agustus 2021 adalah sebanyak 201.083 jiwa.

Jumlah angkatan kerja di Kota Palu yang melakukan aktivitas bekerja pada tahun 2020 adalah sebesar 92,39 persen. Yang dimaksud dengan bekerja adalah melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam tidak terputus selama seminggu yang lalu, termasuk kegiatan pekerja yang tidak dibayar atau pekerja keluarga yang membantu suatu kegiatan atau usaha ekonomi.

Grafik 4.1.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Palu, 2019 – 2021 (Persen)



Sumber: Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka, 2022

Angka TPAK Kota Palu tahun 2021 sebesar 68,73 persen (periode Agustus). Artinya, sebanyak 68,73 persen penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, sisanya bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya). Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa pasokan

tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian Sulawesi Tengah semakin meningkat.

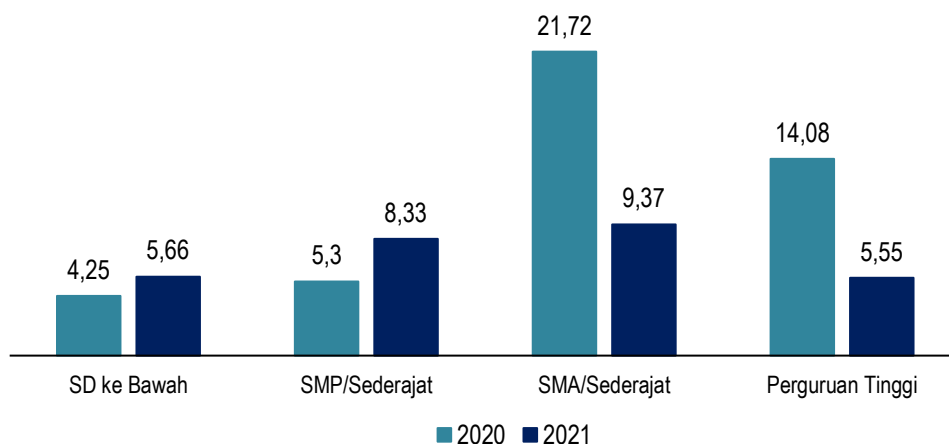
TPT Agustus 2021 di Kota Palu sebesar 7,61 persen, turun 0,77 persen dibanding tahun 2020 yang sebesar 8,38 persen. Ini berarti 7,61 persen angkatan kerja Kota Palu dalam keadaan tidak bekerja atau pengangguran. Jumlah angkatan kerja yang berstatus pengangguran adalah 15.306 jiwa. Jika dibanding tahun 2020, jumlah pengangguran di Kota Palu tahun 2021 berkurang sebesar 1.654 jiwa.

4.2. Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan

Perkembangan ketenagakerjaan tidak hanya terfokus pada peningkatan jumlah tenaga kerja, akan tetapi juga harus didukung dengan kualitas yang mumpuni. Kualitas SDM yang baik akan menjadi modal bagi masyarakat Kota Palu untuk meningkatkan daya saing dalam memasuki pasar tenaga kerja. Jika jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan tenaga kerja yang ada, maka akan terjadi persaingan dalam memperoleh pekerjaan. Tenaga kerja yang tidak bekerja, maka akan menjadi pengangguran.

Grafik 4.2.

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Palu, 2020 dan 2021 (persen)



Dari Grafik di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan SMA/Sederajat memiliki angka pengangguran terbuka tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 9,37 persen. Sebaliknya, angka pengangguran terbuka untuk tingkat Perguruan Tinggi justru menempati posisi paling rendah, yaitu 5,55 persen. Rendahnya angka pengangguran terbuka perguruan tinggi dikarenakan semakin banyak lulusan pendidikan perguruan tinggi, tetapi lapangan pekerjaan yang tersedia belum dapat menampung semua lulusan tersebut. Ini menyebabkan semakin banyak yang menganggur.

Perbaikan kurikulum pendidikan pada semua jenjang diperlukan untuk meningkatkan kualitas SDM. Lulusan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan diharapkan bisa mengikuti perkembangan teknologi. Selain itu, peningkatan kualitas SDM juga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan wirausaha sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru di tengah masyarakat.

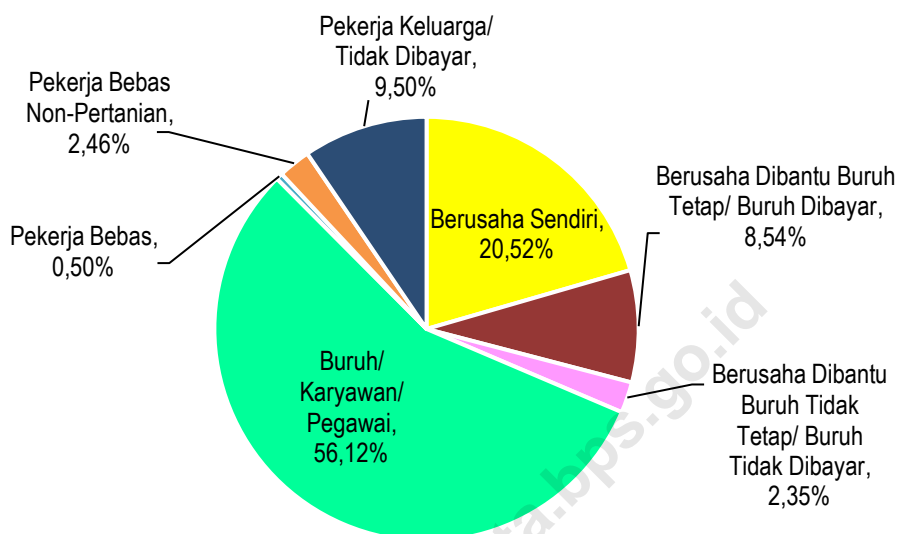
4.3. Status Pekerjaan

Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan merupakan salah satu parameter dalam melihat potensi sektor perekonomian dalam penyerapan tenaga kerja. Selain itu, bisa juga digunakan sebagai ukuran dalam menunjukkan struktur perekonomian suatu wilayah.

Jika dilihat berdasarkan status pekerjaan, penduduk Kota Palu usia 15 tahun ke atas yang bekerja dapat dikelompokkan menjadi berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian, dan pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar.

Grafik 4.3.

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kota Palu, 2021 (persen)



Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2022

Status buruh/karyawan/pegawai adalah status pekerjaan utama yang paling banyak dimiliki oleh penduduk Kota Palu yang bekerja. Buruh/karyawan/pegawai adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Pada tahun 2021, persentase status pekerjaan utama ini mencapai 56,12 persen dari penduduk yang bekerja. Angka ini menurun dibanding tahun 2020 yaitu sebesar 53,65 persen.

Status berusaha sendiri merupakan status pekerjaan utama kedua terbanyak di Kota Palu tahun 2021, yaitu sebesar 20,52 persen. Berusaha sendiri artinya bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus. Status pekerjaan utama selanjutnya adalah pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar yaitu sebesar 9,50 persen. Pada tahun 2021, di Kota Palu tidak ada penduduk dengan status pekerjaan utama sebagai pekerja bebas.

5

Perumahan dan Lingkungan



BAB V

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok diluar kebutuhan pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Rumah tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan primer yang harus dimiliki manusia sebagai tempat untuk berlindung. Lebih luas, pemanfaatan rumah sebagai tempat tinggal tidak hanya sekedar tempat berlindung, akan tetapi harus memenuhi standar kelayakan agar dapat menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesehatan penghuninya. Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Selain untuk memenuhi kebutuhan dasar, rumah juga menjadi salah satu indikator status sosial seseorang. Semakin tinggi tingkat sosial seseorang, semakin lengkap fasilitas rumah yang dimiliki dan juga menunjukkan tingkat kesejahteraan pemiliknya. Hal ini dapat dilihat dari kualitas material yang mencakup jenis atap, dinding, dan lantai terluas yang digunakan. Di samping itu, dapat pula dilihat fasilitas lain yang berkaitan dengan sarana dan prasarana kesehatan, seperti sumber air minum, jamban/kakus, serta sumber penerangan yang digunakan. Terpenuhinya seluruh fasilitas tersebut dapat memberikan kenyamanan dan udara segar bagi pemiliknya.

5.1. Kepemilikan dan Kualitas Rumah Tinggal

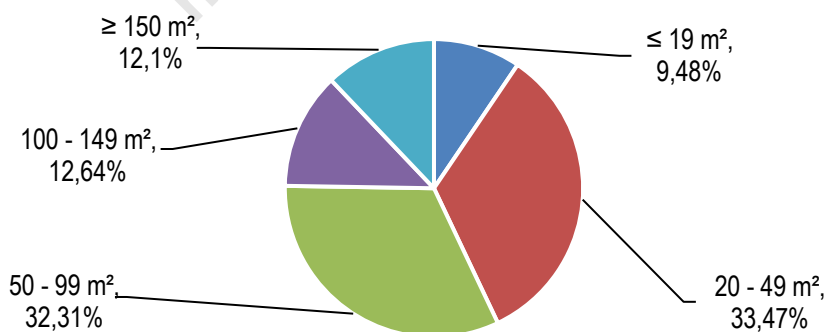
Berdasarkan kepemilikan, persentase rumah tangga pada tahun 2021 di Kota Palu yang menempati rumah milik sendiri sebanyak 58,50 persen.

Status kepemilikan rumah ini dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Dengan menguasai rumah milik sendiri, diharapkan suatu rumah tangga lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan yang lain karena kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang telah mampu dipenuhi. Selain itu, dari sisi psikologis, status penguasaan rumah milik sendiri akan memberikan ketenangan bagi penghuninya dibandingkan dengan menempati rumah sewa atau bebas sewa.

Terkait kualitas, ada beberapa kriteria rumah tinggal yang harus terpenuhi sehingga dapat dikategorikan sebagai rumah layak huni. Kriteria tersebut perlu dilihat dari komponen material pembentuknya seperti luas lantai hunian, jenis atap, lantai dan dinding. Setiap komponen pembentuk rumah turut mempengaruhi keamanan, kenyamanan, dan kesehatan penghuninya. Rumah tinggal yang dikategorikan sebagai rumah layak huni apabila memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal tersebut.

Grafik 5.1.

Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Rumah di Kota Palu, 2021 (persen)



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

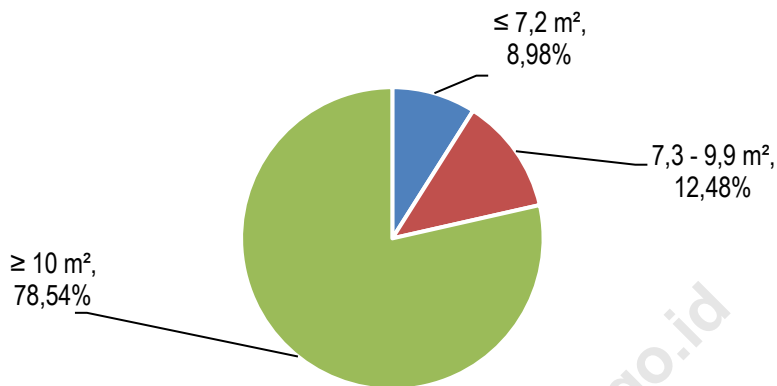
Dari sisi luas lantai, sebesar 33,47 persen rumah tangga di Kota Palu telah menghuni rumah dengan luas lantai 20 - 49 m² dan 32,31 persen dengan luas lantai 50 - 99 m². Luas lantai erat kaitannya dengan tingkat kepadatan hunian atau rata-rata luas ruang untuk setiap anggota keluarga

sehingga tingkat kelayakan tidak cukup dilihat dengan luas rumah dalam sebuah rumah tangga. Namun, penting untuk melihat jumlah anggota rumah tangga yang menghuni rumah tersebut. Oleh karena itu kelayakan rumah lebih mudah diukur dengan luas hunian per kapita.

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m². Sedangkan menurut Ketentuan Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya. Dari hasil kajian dan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia, kebutuhan ruang per orang adalah 9m² dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,80 m. Menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat adalah jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8m² (BPS, 2017).

Sebanyak 78,54 persen rumah tangga di Kota Palu pada tahun 2021 telah menghuni rumah dengan luas lantai 10 m² atau lebih per kapita. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah menghuni rumah dengan luas yang layak sesuai dengan kriteria baik yang disarankan WHO maupun pemerintah Indonesia. Sementara itu, masih terdapat 8,98 persen rumah tangga yang menghuni rumah dengan luas lantai per kapita seluas ≤ 7,2 m².

Grafik 5.2.
Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Rumah Per Kapita di Kota Palu, 2021 (persen)



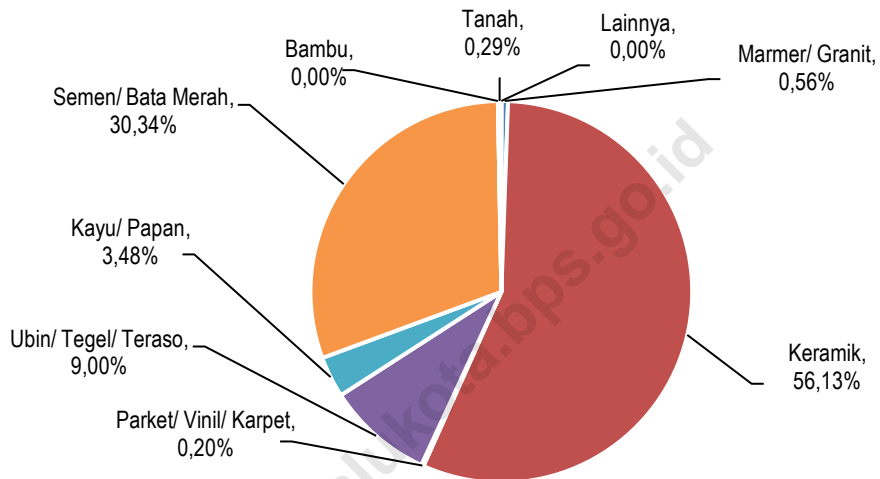
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Selain luas lantai, jenis lantai juga dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kualitas perumahan. Jenis lantai rumah tempat tinggal dapat mempengaruhi kondisi kesehatan penghuninya. Lantai rumah yang baik adalah lantai rumah yang tidak berdebu pada musim kemarau dan tidak basah pada musim hujan, sehingga penularan penyakit dapat dihindari. Jenis lantai yang memenuhi kriteria tersebut yaitu lantai yang berasal dari ubin atau semen, bukan dari tanah. Lantai tanah cenderung lembab dan tidak memenuhi kriteria lantai yang sehat. Lantai tanah dapat menjadi media yang subur bagi timbulnya kuman penyakit dan media penularan bagi jenis penyakit tertentu, seperti penyakit diare, cacangan dan penyakit kulit.

Selain itu, jenis lantai ini juga digunakan untuk melihat kesejahteraan masyarakat. Melalui jenis lantai, kesejahteraan masyarakat tersebut dilihat dari tingkat kualitas perumahan yang dimiliki rumah tangga tersebut. Semakin baik kualitas lantai perumahan dapat diasumsikan semakin membaik tingkat kesejahteraan penduduknya. Rumah tangga dengan jenis lantai keramik atau marmer diasumsikan mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik daripada rumah tangga yang mempunyai jenis lantai semen, ubin, atau tanah. Mayoritas rumah tangga di Kota Palu menghuni rumah dengan lantai terluas keramik, yaitu sebesar 56,13 persen. Sementara itu,

masih terdapat 0,29 persen yang menghuni rumah tinggal dengan lantai terluas berupa tanah.

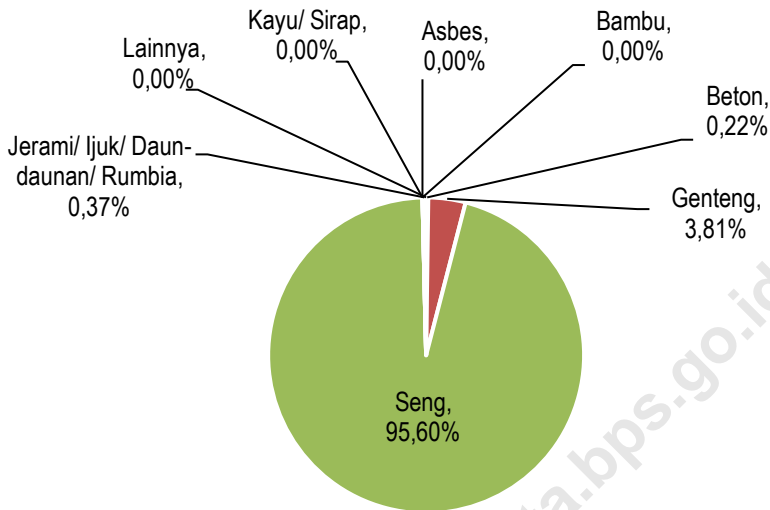
Grafik 5.3.
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Rumah di Kota Palu, 2021 (persen)



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Selain dari komponen lantai, kualitas rumah tinggal juga dapat dari jenis atap dan dinding terluas. Sama halnya dengan jenis lantai, jenis atap dan dinding juga dapat menggambarkan kesejahteraan rumah tangga dimana semakin baik kualitas atap dan dinding rumah maka kesejahteraan rumah tangga tersebut akan semakin baik. Mayoritas rumah tangga di Kota Palu menggunakan seng sebagai atap rumah tinggal.

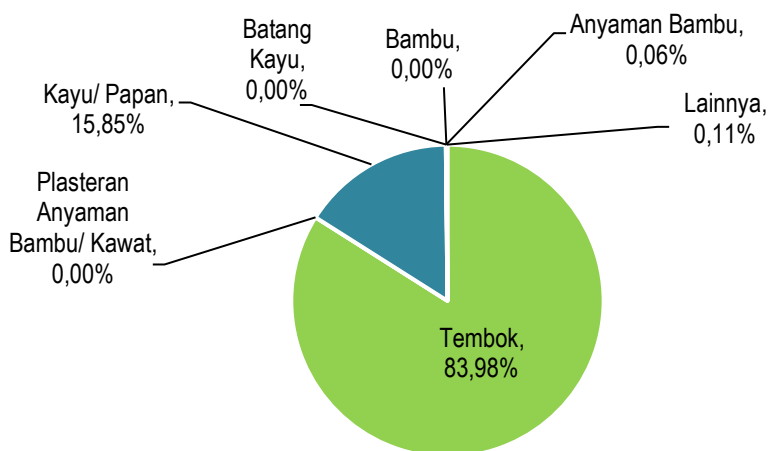
Grafik 5.4.
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Rumah
di Kota Palu, 2021



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Sementara itu, berdasarkan material pembentuk dinding terluas, rumah tinggal masyarakat di Kota Palu didominasi oleh dinding tembok dan kayu, yaitu masing-masing sebesar 83,98 persen dan 15,85 persen. Hal ini menunjukkan kualitas dinding rumah masyarakat sebagian besar telah memenuhi standar layak.

Grafik 5.5.
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas
di Kota Palu, 2021



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

5.2. Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas rumah tinggal masyarakat selain dilihat dari komponen material pembentuk, juga diperlukan fasilitas penunjang sehari-hari seperti sumber air minum bersih, sanitasi yang layak, dan sumber penerangan yang memadai. Kelengkapan fasilitas pokok rumah tinggal akan menentukan nyaman atau tidaknya suatu rumah tinggal, yang kemudian turut menentukan kualitas rumah tinggal tersebut.

Adapun syarat Kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman menurut Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) no. 829/Menkes/SK/VII/1999 adalah lokasi tanah atau bangunan, kualitas udara, kualitas tanah, sarana dan prasarana lingkungan, vektor penyakit, penghijauan, bahan bangunan, komponen dan penataan ruangan, pencahayaan, kualitas udara, serta penyediaan air dan pembuangan limbah. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Tabel 5.1.

Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kota Palu, 2021 (persen)

Indikator Kualitas Perumahan	Persentase
(1)	(2)
Air kemasan, isi ulang, air leding, dan sumur bor/pompa	95,20
Air minum bersih	96,06
Jamban sendiri	91,16
Jamban sendiri dengan tangka septik	96,22
Sumber penerangan listrik PLN	100

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2021, mayoritas rumah tangga di Kota Palu menggunakan air kemasan, air isi ulang, air leding, dan sumur

bor/pompa sebagai sumber air minum, yaitu sebesar 95,20 persen. Selain itu, tercatat 96,06 persen rumah tangga di Kota Palu menggunakan air minum bersih. Air minum layak dan bersih adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah.

Sumber air minum yang layak sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. Apabila air minum yang dikonsumsi merupakan air minum yang tidak layak, maka akan rentan terhadap penyakit khususnya diare. Kondisi tersebut akan mempengaruhi tumbuh kembang anak – anak. Sebagai generasi penerus bangsa, anak – anak harus tumbuh dengan baik dan sehat agar terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas di masa yang akan datang.

Selanjutnya, fasilitas rumah tangga yang sangat perlu untuk diperhatikan yaitu masalah sanitasi, salah satunya yaitu ketersediaan sarana jamban. Apabila ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan, terutama tanah dan sumber air yang berujung pada tingkat kesehatan masyarakat di sekitar lingkungan tersebut. Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut, maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Pada tahun 2021, sebanyak 91,16 persen rumah tangga di Kota Palu telah menggunakan jamban sendiri, sisanya masih ada yang menggunakan jamban bersama (5,35 persen) dan mandi cuci kakus (MCK) komunal dan umum masing-masing sebesar 0,36 persen dan 2,63 persen.

Kelayakan fasilitas buang air besar yang memenuhi syarat kesehatan juga perlu dilihat dari jenis kloset dan tempat pembuangan akhir tinja dimana yang dianjurkan yaitu kloset leher angsa dengan tempat pembuangan tangki septik/SPAL. Di Kota Palu, sudah 97,51 persen rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar menggunakan kloset leher angsa. Sedangkan

menurut tempat pembuangan akhir tinja, 96,22 persen rumah tangga sudah menggunakan tangki septik, sedangkan sisanya masih menggunakan kolam/sawah/sungai/danau/laut, lubang tanah, dan lainnya.

Fasilitas perumahan lainnya yang juga penting yaitu penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Dalam hal ini, hampir seluruh rumah tangga di Kota Palu menggunakan listrik PLN sebagai sumber penerangan utama.

<https://palukota.bps.go.id>

6

Indikator Sosial lainnya



BAB VI

INDIKATOR SOSIAL LAINNYA

Perkembangan zaman di era globalisasi saat ini menuntut masyarakat untuk dapat beradaptasi terhadap segala perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Seiring dengan perubahan yang terjadi, tingkat kebutuhan manusia juga mulai mengalami pergeseran, dari yang sebelumnya merupakan kebutuhan sekunder atau tersier, kini telah berubah menjadi kebutuhan primer. Contoh sederhana seperti kebutuhan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai layanan masyarakat pun sudah beralih dari metode konvensional menjadi metode digital. Di samping itu, berlibur atau berwisata, bahkan eksistensi di tengah masyarakat juga kini menjadi kebutuhan. Hal-hal tersebut tidak lagi terpisahkan dalam kehidupan masyarakat secara umum sehingga menjadi wajar apabila indikator sosial semacam itu kini menjadi salah satu indikator dalam mengukur kesejahteraan masyarakat.

6.1. Akses terhadap Teknologi, Informasi, dan Komunikasi

Tidak dapat dipungkiri bahwa Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini berkembang dengan pesat. Di era TIK yang semakin canggih dan mudah diakses, jarak tidak lagi menjadi masalah dalam hubungan antar individu maupun antar lembaga atau usaha. Ketersediaan infrastruktur dan kemudahan akses terhadap TIK juga mempengaruhi pergerakan manusia pada berbagai bidang, baik itu urusan antar individu, pemerintahan, bisnis, politik, serta yang lainnya. Oleh karena, akses terhadap TIK ini menjadi salah satu faktor pendorong kemajuan suatu daerah.

Kemajuan TIK ini memberi manfaat yang positif bagi masyarakat. Jika hal ini dapat dikembangkan secara optimal, maka akan dapat mengdongkrak kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan TIK, khususnya dalam

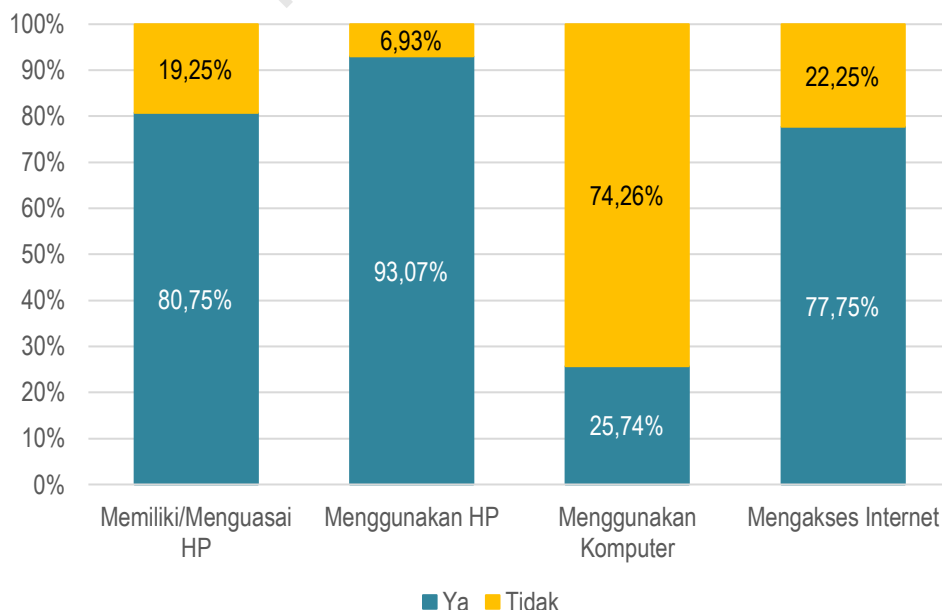
kegiatan ekonomi. Semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses TIK, diharapkan kehidupan akan terus bergerak, sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Dahulu kala, kepemilikan alat TIK, seperti *handphone* dan komputer terbatas pada kalangan ekonomi kelas atas. Namun, kini kebutuhan terhadap TIK sudah menjadi kebutuhan primer dan bahkan *handphone* menjadi bagian dari gaya hidup seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dikarenakan semakin terjangkau harga *smartphone* dan semakin luasnya cakupan wilayah jangkauan frekuensi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data internet.

Pada tahun 2021, persentase penduduk berumur lima tahun ke atas yang memiliki/menguasai telepon seluler sebanyak 80,75 persen. Hal ini menunjukkan sudah lebih dari setengah penduduk berumur lima tahun ke atas telah memiliki dan mengakses telepon seluler. Sementara yang telah menggunakan telepon seluler/HP telah mencapai 93,07 persen.

Grafik 6.1.

Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Beberapa Akses Terhadap TIK di Kota Palu, 2021 (persen)



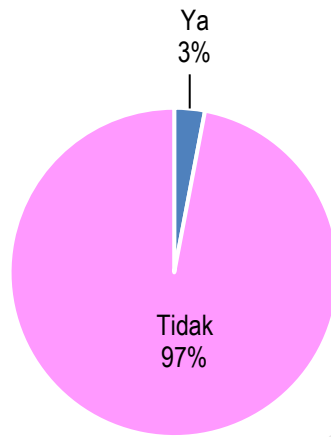
Berbeda dengan telepon seluler, penggunaan komputer menunjukkan angka yang lebih kecil. Persentase penduduk yang mengakses komputer di Kota Palu pada tahun 2021 masih 25,74 persen. Masih rendahnya persentase penduduk penggunaan komputer ini dikarenakan tidak semua masyarakat membutuhkan komputer, hanya pekerjaan dan urusan tertentu saja yang memanfaatkan komputer. Sementara untuk telepon seluler lebih banyak dibutuhkan hampir di semua lapisan masyarakat. Selain itu, penggunaan telepon seluler juga lebih mudah dioperasikan, lebih terjangkau, mobilitasnya juga lebih mudah, dan sebagian besar hanya digunakan untuk komunikasi, sedangkan komputer lebih kompleks. Namun, akses internet di Kota Palu terbilang sudah cukup tinggi, yaitu sebesar 77,75 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Sebagian besar masyarakat Kota Palu sudah terbiasa dengan internet.

6.2. Tindak Kejahatan

Adanya rasa aman dari tindak kejahatan menjadi salah satu indikator yang dapat mencerminkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tidak hanya dilihat dari terpenuhinya kebutuhan pokok sehari-hari, namun rasa aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitas juga harus terpenuhi. Dalam penyusunan Indeks Kebahagiaan Indonesia oleh BPS tahun 2014, rasa aman ini juga menjadi salah satu aspek penyusunnya.

Tindak kejahatan adalah segala tindakan yang disengaja atau tidak, telah terjadi atau baru percobaan, yang dapat merugikan orang lain dalam hal badan, jiwa, harta benda, kehormatan, dan lainnya serta tindakan tersebut diancam hukuman penjara dan kurungan (BPS). Tindak kejahatan ini dapat terjadi akibat berbagai faktor, salah satunya akibat kesenjangan sosial dan ekonomi.

Grafik 6.2.
**Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan
di Kota Palu, 2021 (persen)**



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Pada tahun 2021, masih terdapat 3 persen penduduk Kota Palu yang menjadi korban kejahatan. Meskipun cenderung kecil, angka ini perlu diwaspadai dan dapat menjadi peringatan dini bagi pihak yang berwajib untuk terus berupaya menumpas segala bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga diharapkan agar lebih waspada.

D A T A
MENCERDASKAN BANGSA
Enlighten The Nation



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PALU**

Jl. Baruga No. 19 Palu, Sulawesi Tengah

Telp. (0451) 422066

Email: bps7271@bps.go.id, Website: <http://palukota.bps.go.id>

ISSN 2715-6907



9 772715 690005